

RESILIENSI DAN STRATEGI NAFKAH RUMAH TANGGA PERTANIAN PENYINTAS GEMPA LOMBOK 2018 PADA MASA TANGGAP DARURAT DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

THE RESILIENCE AND AGRICULTURAL HOUSEHOLD LIVELIHOOD STRATEGIES OF THE 2018 LOMBOK EARTHQUAKE VICTIMS AT THE EMERGENCY PERIOD IN NORTH LOMBOK REGENCY

Muhammad Nurjihadi¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. email: m.nurjihadi@uts.ac.id

ABSTRAK

Gempa bumi besar melanda Pulau Lombok pada pertengahan tahun 2018 yang menyebabkan hampir 100% penduduk Kabupaten Lombok Utara (KLU) kehilangan rumah dan sumber nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas resiliensi dan strategi nafkah pengungsi penyintas gempa di KLU, terutama dari komunitas pertanian dalam menghadapi masa tanggap darurat pasca gempa. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran (*mix method*) antara model kualitatif dan kuantitatif yang disajikan secara deskriptif. Data kualitatif dikumpulkan dengan teknik *purposive area snowball sampling* sedangkan data kuantitatif didapatkan dengan teknik *Displacement Tracking Matrix* (DTM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana gempa menyebabkan masyarakat yang menjadi penyintas di KLU kehilangan sumber nafkah (*livelihood*) pada seluruh sektor pekerjaan. Modal sosial memainkan peranan penting sebagai strategi utama yang digunakan pengungsi untuk menunjang kebutuhan nafkah hidup keluarga dan menguatkan daya resiliensi masyarakat dalam menghadapi masa darurat bencana. Dengan modal sosial tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masa darurat dengan memanfaatkan bantuan dari luar, kekayaan alam sekitar, dan sisa-sisa aset yang dapat diselamatkan dari reruntuhan rumah mereka yang dikelola secara kolektif dengan norma-norma sosial yang ada.

Kata Kunci: penyintas gempa; rumah tangga pertanian; strategi nafkah; resiliensi

ABSTRACT

A great earthquake was hitting Lombok in August 2018 that caused damage to home and livelihood sources of almost 100% of North Lombok Regency (KLU) population. This research is aimed to investigate the resilience capacity and livelihood strategies of displaced people (the earthquake victims) of KLU, especially the agricultural families during the post disaster emergency period. This research is using mix method between qualitative and quantitative approaches that explained descriptively. The qualitative data in this research was obtained using purposive area snowball sampling technique while the quantitative data was obtained through a comprehensive survey using Displacement Tracking Matrix (DTM) technique. Result of the research revealed that the earthquake caused the lost of jobs and livelihood sources of KLU's people in all economic sectors, including agricultural sector. Social capital of the society was influential as a main strategy of the victims to fulfil their daily needs and strengthen their social resilience in facing the damaging impact of the disaster. By exploiting their social capital, the society was able to fulfil their daily needs by managing all external aids, natural resources, and their remaining personal assets based on their common understanding, local wisdom, and social norms that exist in the society.

Keywords: earthquake victims; agricultural families; livelihood strategies; resilience

PENDAHULUAN

Gempa bumi dengan kekuatan berskala besar secara bertubi-tubi melanda wilayah Pulau Lombok pada akhir Juli hingga Agustus 2018. Sampai pada tanggal 13 Agustus 2018, sebanyak 436 orang meninggal dunia, 1.353 orang mengalami luka-luka dan jumlah pengungsi mencapai 352.793 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2018). Tingginya jumlah pengungsi tersebut disebabkan karena rusaknya rumah milik penyintas gempa sehingga tidak bisa lagi ditempati. Tidak hanya kehilangan rumah dan anggota keluarga, masyarakat penyintas gempa juga kehilangan aset-aset ekonomi, bahkan juga kehilangan sumber nafkah mereka selama ini. Wilayah dengan tingkat kerusakan serta jumlah penyintas terbanyak adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang merupakan titik episentrum gempa. KLU merupakan kabupaten dengan jumlah pekerja di sektor pertanian mencapai 54% dari total populasi (Pekab KLU, 2017).

Peristiwa bencana pada umumnya akan merubah pola strategi nafkah (*livelihood strategy*) dari masyarakat terdampak bencana. Alviawati (2013) membuktikan bahwa ketika terjadi bencana erupsi Gunung Merapi di Jogjakarta, terjadi perubahan pola dan strategi penghidupan masyarakat terdampak erupsi, khususnya para peternak sapi. Adaptasi sosio-ekonomi terhadap peristiwa ekologis adalah keniscayaan yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat bertahan hidup. Sebagaimana ditunjukkan juga oleh Fatmasari *et al*(2019) yang meneliti proses adaptasi strategi nafkah petani akibat terjadinya perubahan ekologis karena maraknya penanaman sawit di Mamuju Tengah. Massifnya perkebunan kelapa sawit oleh para investor di wilayah tersebut telah merubah strategi nafkah petani dari petani padi di sawah menjadi petani kelapa sawit kecil dan pengumpul rumput untuk ternak. Hal itu karena padi yang mereka tanam di sawah kerap mengalami gagal panen karena rusaknya kualitas hara tanah dan membludaknya hama seperti tikus, musang, dan sebagainya akibat rusaknya lingkungan ekologis karena penanaman sawit.

Kesimpulan yang dibuat oleh Alviawati (2013) dan Fatmawati *et al* (2019) menunjukkan proses adaptasi strategi nafkah pada kondisi perubahan ekologis akibat bencana alam yang terjadi secara alami dan bencana alam yang terjadi karena intervensi modal oleh manusia. Dua penelitian tersebut mengelaborasi proses adaptasi setelah masa-masa krisis akibat bencana relatif sudah pulih. Artinya, proses adaptasi tersebut bersifat jangka panjang. Sementara itu, bagaimana masyarakat mampu melewati masa-masa sangat sulit pada periode gawat darurat (*emergency*) tidak lama setelah bencana melanda tidak dibahas dalam paper tersebut. Pola adaptasi strategi nafkah jangka pendek pada masyarakat tertimpa bencana memang belum banyak dibahas oleh para pemerhati sosial ekonomi mengingat peristiwa bencana bukanlah peristiwa rutin yang jadwalnya dapat diketahui dengan pasti. Namun demikian, kajian ilmiah mengenai adaptasi jangka pendek strategi nafkah para penyintas bencana perlu dilakukan untuk mengenali bagaimana para penyintas bencana itu bertahan hidup saat melewati periode tersulit ketika bencana baru saja melanda dan merenggut kehidupan dan penghidupan mereka sebelumnya.

Pada dasarnya, *livelihood strategy* dapat dipahami sebagai cara-cara atau mekanisme yang dibangun oleh manusia, baik sebagai individu, rumah tangga, maupun komunitas untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya berdasarkan setting sosial, budaya, politik, ekologis, serta setting ekonomi yang khas pada tempat dan waktu tertentu (Dharmawan, 2007). Dengan pemahaman tersebut, paper ini akan mengelaborasi bagaimana para penyintas Gempa Lombok 2018 di KLU yang merupakan kabupaten paling parah terdampak gempa mempertahankan eksistensi kehidupan diri dan keluarganya pada masa tanggap darurat bencana serta pada awal masa transisi, yaitu pada bulan Agustus-September 2018. Masa-masa ini merupakan masa kritis karena para penyintas gempa baru saja kehilangan keluarga, aset ekonomi, serta sumber nafkahnya akibat gempa. Pada situasi kritis ini, para penyintas belum bisa berfikir dengan jernih dan matang mengenai strategi nafkah jangka panjang karena berorientasi pada kebutuhan jangka pendek keluarganya, yaitu makan, pakaian, dan hunian sementara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehilangan sumber nafkah penyintas gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) selama masa tanggap darurat dan masa transisi awal. Selanjutnya, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja strategi nafkah rumah tangga yang digunakan oleh para penyintas gempa untuk menghadapi situasi yang sangat sulit pada masa tanggap darurat dan transisi awal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mix method*) antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Oleh karenanya, data yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif didapatkan melalui survey dengan proses wawancara mendalam dengan perwakilan penyintas gempa di wilayah yang dipilih secara *purposive*. Wilayah yang dipilih tersebut mewakili dua kondisi wilayah yang berbeda, yaitu kondisi wilayah yang *easy access* dan kondisi wilayah yang relatif terisolir. Responden dalam penelitian kualitatif ini ditetapkan dengan teknik *purposive area snowball sampling*, yaitu kombinasi antara *purposive* dan *snowballsampling* dengan memperhatikan proporsionalitas wilayah. Pada tahap awal, responden pada masing-masing wilayah ditetapkan dengan teknik *purposive*, sedangkan responden

berikutnya di setiap wilayah ditetapkan dengan teknik *snowball*, yaitu menanyakan kepada responden sebelumnya mengenai siapa yang cocok dijadikan responden berikutnya. Proses ini berakhir sampai data yang didapatkan dianggap mencapai titik saturasi, yaitu titik dimana informasi tambahan tidak diperlukan lagi. Untuk mematangkan analisis kualitatif, juga dilakukan penelitian dengan metode observasi berperan serta (*participant observation*). Adapun survey kualitatif ini dilakukan pada tanggal 7 - 25 Agustus 2018.

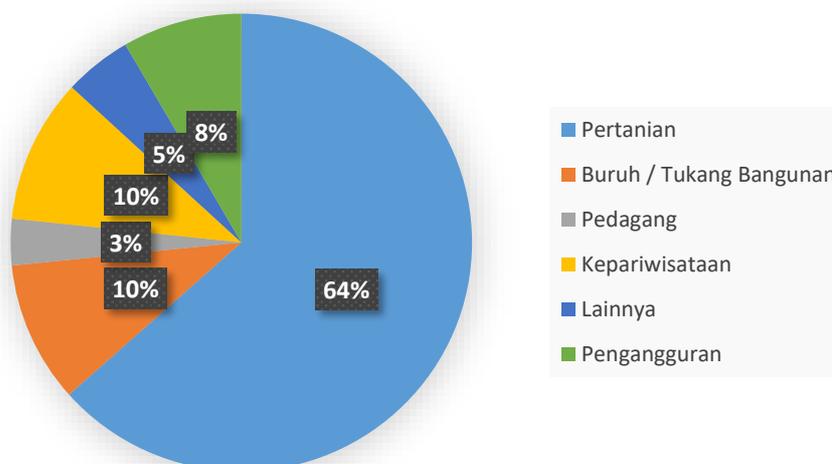
Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini juga didapatkan melalui survey, namun bersifat lebih menyeluruh guna mengukur bagaimana penyintas gempa mengembangkan strategi nafkahnya pada masa tanggap darurat dan transisi awal. Survey kuantitatif ini dilakukan di seluruh wilayah KLU dengan menjadikan *camp* pengungsi dengan minimal 4 Kepala Keluarga (KK) sebagai unit analisis. Survey menyeluruh ini merupakan bagian dari program *Displacement Tracking Matrix* (DTM) yang dilakukan untuk memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan pengungsi pada masa tanggap darurat. Data yang dihasilkan melalui DTM ini akan disajikan secara deskriptif serta dianalisis bersamaan dengan data kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun DTM ini dilaksanakan pada tanggal 12 - 14 September 2018. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi, yaitu menganalisa data dengan mengkombinasikan tiga sumber bahan analisis, yakni hasil wawancara kualitatif, data kuantitatif primer maupun sekunder, dan penelusuran dokumen yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehilangan Sumber Nafkah

Gempa bumi dengan kekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Lombok memiliki daya rusak yang sangat mematikan. Hasil kajian BNPB (2018) menunjukkan bahwa total kerugian akibat gempa tersebut mencapai Rp 8,2 Triliun yang terdiri dari kerugian akibat kerusakan rumah, fasilitas dan infrastruktur publik, serta aset usaha milik masyarakat. Kondisi ini disertai dengan hilangnya sumber nafkah rumah tangga akibat banyaknya kerusakan pada lokasi kerja, tidak adanya permintaan pasar, dan berhentinya proses produksi. Situasi seperti ini terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi di KLU. Dengan demikian, bencana tersebut secara drastis menciptakan gelombang pengangguran yang tak terkendali sehingga sumber pendapatan keluarga menjadi hilang.

Sebelum terjadinya gempa, sebagian besar pengungsi di KLU merupakan petani. Hasil DTM menunjukkan jumlah pengungsi di KLU yang sebelumnya berprofesi sebagai petani berjumlah 64%. Selanjutnya sekitar 10% dari pengungsi tersebut bekerja di sektor pariwisata, baik terserap secara formal seperti di hotel, restoran, dan sebagainya maupun yang bekerja di sektor pariwisata secara informal seperti *guide*, *porter*, pedagang souvenir keliling, dan sebagainya. Adapun yang lain berprofesi sebagai buruh bangunan, pedagang kaki lima, dan lainnya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, gempa mempengaruhi warga yang bekerja di seluruh sektor tersebut. Adapun sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata karena gempa membuat para wisatawan tidak berani untuk berwisata ke Lombok dan beberapa destinasi wisata memang terpaksa ditutup karena rusak akibat gempa atau rawan menimbulkan penyintas jiwa. Berdasarkan hasil survey dengan metode DTM, berikut adalah detail jenis pekerjaan pengungsi penyintas gempa sebelum terjadinya gempa di KLU.



Gambar 1. Persentase pengungsi berdasarkan jenis pekerjaan di KLU (data DTM diolah, 2018)

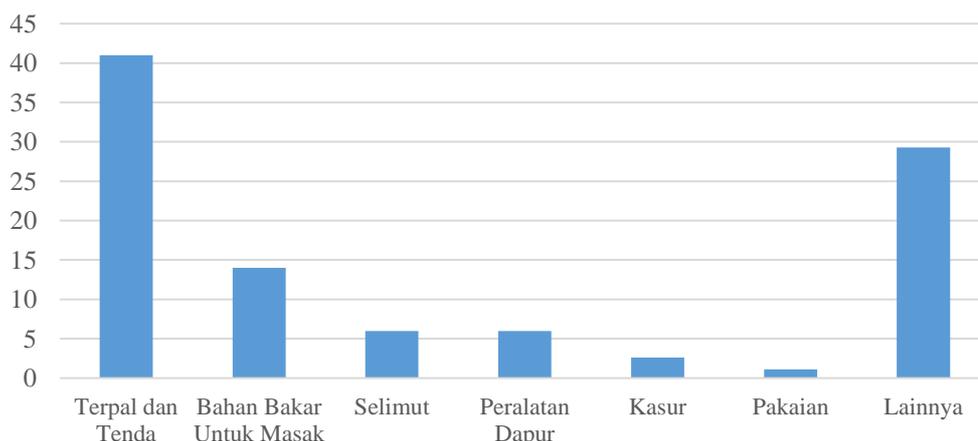
Seorang informan yang kami wawancara dari Desa Loloan, Kecamatan Bayan yang bernama Irawadi menjelaskan bahwa dirinya dan puluhan orang lainnya di Desa Loloan kehilangan sumber pemasukan sama sekali setelah Pendakian Gunung Rinjani ditutup oleh Pemerintah Daerah. Sebelum gempa, Irawadi berprofesi sebagai porter bagi para wisatawan yang hendak mendaki Gunung Rinjani. Dengan ditutupnya aktifitas pendakian di Gunung Rinjani, ia tak lagi punya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Informan lain bernama Raden Kerta yang sehari-hari berjualan pernak Pernik khas Desa Adat Bayan juga mengaku kehilangan sumber nafkah. Gempa membuat desa adat mereka tak lagi menarik bagi wisatawan, terlebih beberapa akses infrastruktur menuju desa wisata ini juga mengalami kerusakan signifikan. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh banyak informan lainnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak oleh gempa Lombok tersebut.

Selain itu, seorang responden di Kecamatan Kayangan mengatakan bahwa longsor yang diakibatkan oleh gempa bumi tersebut juga membuat warga yang berprofesi sebagai petani mengalami kerugian karena tanaman mereka tertimbun dan tidak dapat diairi sebab sumber air mengalami kerusakan karena gempa. Kerugian serupa juga dihadapi oleh para peternak karena banyak hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan sebagainya yang mati tertindih bangunan kandang atau lepas karena kandangnya rusak atau hilang karena dicuri. Lebih dari itu, rusaknya infrastruktur jalan juga membuat akses pemasaran produk-produk pertanian, peternakan, dan perkebunan jadi semakin sulit. Terlebih dengan semakin ramainya jalanan oleh mobil-mobil bantuan yang datang dari luar wilayah KLU. Sementara itu, hasil survey DTM menunjukkan bahwa hampir 65% pengungsi penyintas gempa di KLU bekerja di sektor pertanian dalam arti luas yang terdiri dari pertanian ladang, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Selanjutnya, masifnya wilayah terdampak gempa juga membuat banyak warga yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kelontong, pedagang kaki lima, tukang ojek, dan sebagainya kehilangan pekerjaan dan sumber nafkah. Terlebih dengan banyaknya isi toko yang hilang dijarah masyarakat penyintas gempa maupun disumbangkan sukarela oleh pemilik toko untuk keperluan makan pada hari pertama pasca terjadinya gempa sebelum bantuan berdatangan dari luar wilayah KLU. Dengan demikian, bencana gempa tersebut menyebabkan kehilangan sumber nafkah pada seluruh sektor yang ada di KLU. Satu-satunya kelompok masyarakat yang tidak kehilangan sumber nafkah adalah pekerja sektor publik (Aparatur Sipil Negara/ASN) karena gaji mereka terjamin dari pemerintah pusat, namun jumlah penyintas gempa yang menjadi ASN sangat sedikit yang berdasarkan hasil survey DTM hanya berjumlah 0,31% dari total 109.003 orang pengungsi di KLU

Strategi Nafkah Rumah Tangga

Hancurnya rumah dan segala harta benda akibat gempa serta hilangnya sumber nafkah rumah tangga membuat banyak warga menjadi bergantung pada bantuan dari luar sebagai sumber nafkah. Meski

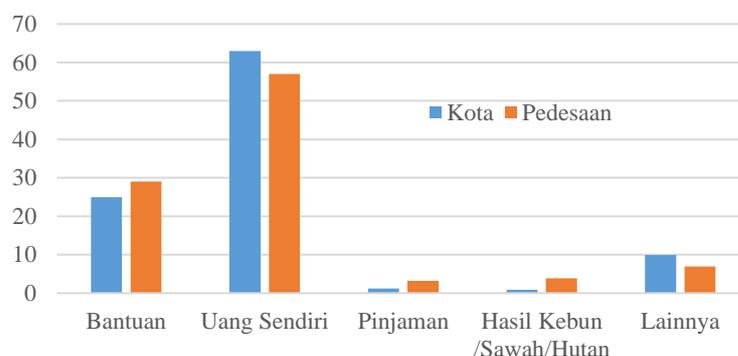


Gambar 2. Kebutuhan rumah tangga (selain makanan) penyintas gempa Lombok pada masa tanggap darurat

demikian, banyaknya penyintas gempa menyebabkan jumlah bantuan yang datang tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat penyintas gempa. Oleh sebab itu diperlukan upaya lain dari para pengungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya ditempat pengungsian. Secara umum, ada beberapa kebutuhan dasar keluarga yang harus dipenuhi oleh pengungsi, baik pengungsi yang ada di wilayah yang mudah diakses maupun pengungsi di wilayah yang agak dalam dan sulit diakses. Berdasarkan survey yang kami lakukan dengan teknik DTM, kami temukan prioritas kebutuhan pengungsi selain makanan adalah sebagai berikut:

Hasil survey diatas menunjukkan persentase item yang paling banyak dibutuhkan oleh pengungsi penyintas gempa di KLU pada masa tanggap darurat selain kebutuhan makanan. Terlihat bahwa kebutuhan tenda dan terpal menjadi yang paling diperlukan sebagai tempat berlindung dari teriknya matahari di siang hari dan dinginnya angin pada malam hari. Selain itu, kebutuhan memasak dalam bentuk bahan bakar dan peralatan dapur juga banyak diperlukan oleh para pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa para pengungsi tersebut tidak sepenuhnya mengandalkan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan nafkah hariannya. Dari semua jenis kebutuhan non pangan tersebut, yang paling sedikit diperlukan oleh para pengungsi adalah pakaian. Hal ini bukan karena pengungsi tidak memerlukan pakaian, namun kondisi darurat membuat mereka lebih mengutamakan keperluan lain yang lebih mendasar untuk bisa bertahan hidup (*survive*). Hal ini dapat dipahami dengan teori kebutuhan hirarki Maslow yang mengatakan bahwa ada lima kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan manusia yaitu (1) kebutuhan Fisiologis yang terdiri dari kebutuhan makanan dan penunjang metabolisme tubuh; (2) kebutuhan rasa aman; (3) kebutuhan cinta dan perasaan memiliki; (4) kebutuhan penghargaan dan pengakuan; (5) kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat hirarkis dimana kebutuhan kedua baru akan dibutuhkan setelah kebutuhan pertama terpenuhi, kebutuhan ketiga diperlukan setelah kebutuhan kedua dipenuhi dan begitu seterusnya (Mathes, 1981). Dalam kasus ini, pakaian merupakan bagian dari kebutuhan aktualisasi diri yang berada pada hirarki kelima dalam hirarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow.

Meski kehilangan sebagian besar aset dan sumber nafkah karena gempa, para pengungsi tidak sepenuhnya berpangku tangan pada bantuan untuk bisa bertahan hidup. Untuk keperluan makanan misalnya, sebagian besar sumber makanan penyintas gempa justeru berasal dari hasil pembelanjaan uang sendiri. Gambar 3 berikut adalah detail sumber makanan pengungsi penyintas gempa di KLU pada masa tanggap darurat berdasarkan hasil penelusuran melalui metode DTM:



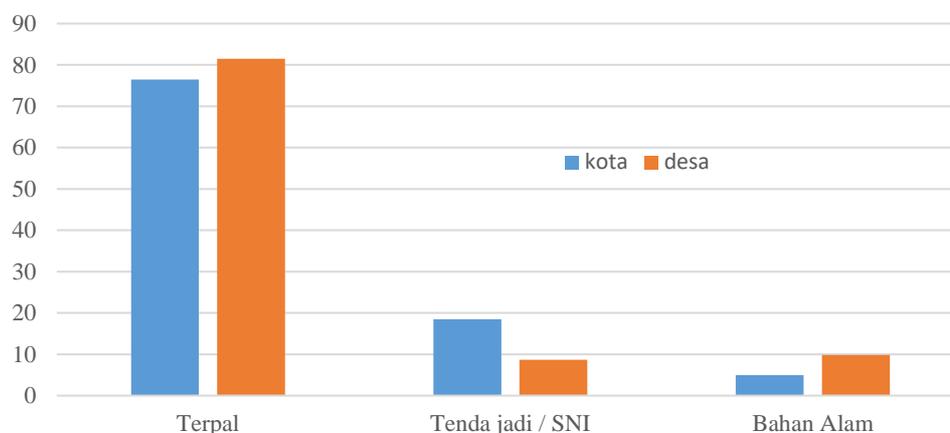
Gambar 3. Sumber Nafkah Makanan Pengungsi Penyintas Gempa KLU pada masa tanggap darurat

Diagram diatas menunjukkan perbandingan sumber nafkah pengungsi yang tinggal di wilayah perkotaan dan mudah diakses oleh pemberi bantuan dengan pengungsi yang berada di lokasi yang cukup jauh sehingga agak sulit diakses oleh bantuan di wilayah KLU. Sepintas terlihat bahwa pengungsi di wilayah pedesaan yang agak dalam menerima lebih banyak bantuan dibanding pengungsi pada wilayah perkotaan KLU. Namun hal ini tidak berarti bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh pengungsi di wilayah pedesaan itu lebih besar dari pada pengungsi yang ada di wilayah perkotaan. Data diatas hanya menunjukkan proporsi atau persentase sumber makanan yang diterima oleh pengungsi pada masing-masing kelompok. Artinya, meski persentase bantuan yang diterima masyarakat pedesaan lebih tinggi dari pada wilayah perkotaan, tidak berarti bahwa nilai nominal atau jumlah bantuan yang diterima masyarakat pedesaan lebih besar dari pengungsi wilayah perkotaan KLU.

Terlepas dari hal tersebut, yang paling menonjol dari data diatas adalah bahwa pemenuhan kebutuhan makanan oleh pengungsi sebagian besar bersumber dari hasil pembelanjaan uang sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meski dalam situasi tanggap darurat, pengungsi masih memiliki uang untuk dibelanjakan. Namun demikian, karena infrastruktur bisnis dan retail sepenuhnya hancur karena gempa di wilayah KLU, uang tersebut dibelanjakan di luar wilayah KLU, yakni di Kota Mataram. Perwakilan pengungsi bisa datang langsung untuk belanja di Mataram atau bisa dengan meminta bantuan keluarga atau sahabatnya yang sedang berada di luar KLU, atau terkadang juga dengan meminta bantuan relawan yang ada di lokasi terdampak untuk pergi belanja ke luar wilayah KLU. Dengan demikian, meski menggunakan uang sendiri, faktor bantuan dari sumber lain memerankan peran penting dalam proses pemenuhan nafkah rumah tangga dan komunitas para penyintas gempa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian penyintas gempa selama masa tanggap darurat mengalami penurunan cukup signifikan karena masyarakat mengalami kerentanan sosial akibat banyaknya kerugian yang dialami penyintas gempa, baik secara materil maupun non materil. Sebagaimana dijelaskan

Hastowiyono (2012) bahwa ketimpangan struktur sosial akibat perubahan-perubahan yang bersumber dari internal maupun eksternal masyarakat dapat menyebabkan terjadinya kerentanan sosial yang bisa berujung pada melemahnya daya kemandirian masyarakat. Dalam hal ini gempa merupakan sumber perubahan eksternal yang menyebabkan berubahnya struktur sosial di masyarakat sehingga mengalami kerentanan sosial.

Hal menarik lain dari temuan dengan metode DTM diatas adalah bahwa pengungsi wilayah pedesaan memiliki alternatif yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan komunitas. Keberadaan kebun dan sawah di wilayah pedesaan terbukti menjadi alternatif yang penting untuk memenuhi nafkah keluarga penyintas gempa di wilayah pedesaan, terutama pada masa tanggap darurat. Melalui wawancara mendalam yang kami lakukan, peran kebun, sawah, dan hutan dalam pemenuhan kebutuhan penyintas gempa di wilayah pedesaan itu lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga kebutuhan hunian sementara dimana para pengungsi membangun tenda atau hunian untuk keluarganya dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kebun seperti daun kelapa, ranting pohon, jerami padi, dan sebagainya. Hal ini juga tergambar dalam survey dengan metode DTM yang kami lakukan dimana penggunaan bahan alam sebagai bahan dasar hunian sementara di wilayah pedesaan hampir dua kali lipat lebih besar dibanding wilayah perkotaan yang mudah diakses karena dekat dengan jalur transportasi utama.



Gambar 4: Jenis Hunian Sementara Pengungsi Penyintas Gempa di KLU Pada Masa Tanggap Darurat Berdasarkan Bahan Pembuatan

Meski komposisi penggunaan bahan alam relatif lebih kecil dibanding bahan lainnya sebagai bahan pembuatan hunian sementara, namun data diatas menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang jauh dari akses transportasi utama lebih kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada disekitar mereka untuk menyediakan hunian bagi keluarga dan komunitasnya pada masa tanggap darurat bencana. Terlepas dari itu, terpal adalah bahan hunian yang paling populer dipakai oleh warga karena sebagian besar bantuan yang datang memang lebih banyak dalam bentuk terpal daripada tenda jadi. Adapun tenda jadi (tenda praktis siap pakai dan layak huni) lebih banyak disediakan oleh lembaga-lembaga resmi negara seperti BNPB, Badan SAR, TNI, Polri, dan sebagainya. Sayangnya, jumlah ketersediaan tenda jadi itu sangat sedikit sehingga sama sekali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang jumlahnya sangat banyak. Tenda jadi ini lebih layak untuk dihuni karena memang di desain sebagai tempat hunian sementara pada saat terjadi bencana. Namun karena ketersediaannya terbatas, maka tenda jadi tersebut lebih banyak disalurkan di wilayah perkotaan yang padat penduduk dan berada di pinggir jalan utama.

Dari observasi yang kami lakukan, didapati fakta bahwa sebagian besar bantuan dari luar KLU terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang dekat dengan akses jalan utama. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari para pengungsi yang berada jauh dari akses jalan utama. Kondisi ini mendorong beberapa pengungsi dari wilayah pedalaman KLU yang jauh dari jalan utama untuk melakukan penghadangan bantuan di pinggir jalan utama. Fenomena ini sempat dianggap sebagai gangguan keamanan dalam penyaluran bantuan penyintas gempa di KLU. Namun setelah kami telusuri melalui observasi berperan serta dan wawancara mendalam, hal tersebut dilakukan warga pedalaman sebagai bagian dari cara mereka untuk bertahan hidup pada masa tanggap darurat. Dengan kata lain, penghadangan bantuan di jalan adalah bagian dari strategi nafkah yang mereka lakukan. Meski demikian, para pengungsi penghadangan bantuan dari wilayah pelosok KLU ini tidak penghadangan semua bantuan yang lewat. Mereka menyasar bantuan yang dikirim oleh lembaga-lembaga resmi negara seperti kementerian, pemerintah daerah, dan sebagainya. Para penghadangan yang saat itu sering dianggap sebagai penjarah ini tidak

memaksakan untuk mengambil bantuan dari masyarakat sipil yang sudah memiliki tujuan khusus. Mereka hanya meminta pada pengirim bantuan dari unsur masyarakat sipil yang belum memiliki tujuan pasti untuk mengirimkan bantuannya.

Selain itu, para pengungsi juga mempertahankan kehidupan diri dan keluarganya dengan secara aktif mengumpulkan sisa-sisa aset yang dimiliki untuk dijual atau dikelola. Namun upaya ini sangat sulit untuk dilakukan mengingat kebanyakan aset tersebut berada dibawah reruntuhan bangunan rumah mereka yang belum sepenuhnya runtuh. Artinya, bangunan tersebut masih rapuh dan sangat mungkin untuk runtuh total kapan saja sehingga tidak banyak pengungsi yang berani masuk ke bekas rumahnya yang sudah roboh karena takut tertimpa reruntuhan lanjutan. Aset ekonomi lain yang paling mungkin untuk diinventarisir dan dikelola kembali oleh para pengungsi di masa tanggap darurat adalah aset-aset pertanian dan peternakan. Adapun sebagian besar pengungsi bekerja pada sektor pertanian tersebut meski sebagian diantara mereka mengalami kerugian akibat gempa karena lahan dan tanaman mereka mengalami kelongsoran atau tertimbun longsoran tanah.

Secara umum, jumlah bantuan maupun hasil kerja mandiri masyarakat secara total tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat pengungsi penyintas gempa di KLU. Oleh karenanya, semua strategi nafkah yang telah dijelaskan diatas sejatinya belum dapat memenuhi kebutuhan semua pengungsi. Oleh karenanya, strategi nafkah lain yang digunakan oleh para pengungsi penyintas gempa adalah strategi nafkah kolektif (*collective livelihood strategy*), yakni dengan membentuk struktur-struktur komunal yang mengelola kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Struktur komunal ini berfungsi sebagai pengelola seluruh bantuan maupun hasil kerja mandiri masyarakat untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian seluruh pengungsi yang menjadi anggota komunitasnya di suatu camp pengungsian. Tanpa struktur komunal ini, ketersediaan kebutuhan sehari-hari bagi para pengungsi tidak akan terdistribusi secara merata sehingga akan menyebabkan banyak pengungsi kekurangan sumber nafkah untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

Modal sosial dan Resiliensi

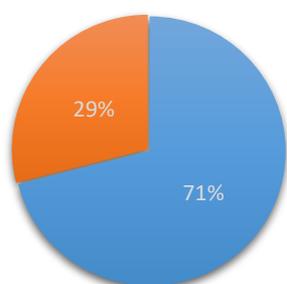
Resiliensi sosial pada prinsipnya merupakan konsep yang mengukur kemampuan masyarakat atau komunitas untuk beradaptasi dalam menghadapi berbagai krisis, tantangan, gangguan, ancaman, dan tekanan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu (Maguere & Hagan, 2007). Keck dan Sakdapolrak (2013) merumuskan setidaknya ada tiga dimensi resiliensi, yaitu: (1) dimensi *coping capacities*, yakni kemampuan untuk mengatasi dan menemukan solusi atas berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi; (2) dimensi *adaptive capacities*, yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan tantangan masa depan dalam kehidupan sosial mereka; serta (3) dimensi *transformation capacities*, yang bermakna kemampuan masyarakat dalam membuat seperangkat institusi yang dapat mendorong kesejahteraan individu dan keberlanjutan ketahanan sosial dalam menghadapi krisis-krisis yang akan datang. Secara umum, rumusan resiliensi sosial yang dikembangkan Keck dan Sakdapolrak diatas erat kaitannya dengan modal sosial.

Salah satu aspek penting yang menunjang kehidupan masyarakat penyintas gempa selama masa tanggap darurat di KLU adalah kuatnya modal sosial masyarakat. Modal sosial ini tercermin dari sikap gotong royong, saling pengertian, dan welas asih antar warga penyintas gempa. Meski sama-sama menghadapi situasi sulit karena kehilangan sumber nafkah, para pengungsi tidak terlibat dalam konflik sosial untuk berebut makanan maupun kebutuhan hidup lainnya, justru seluruh anggota masyarakat bahu membahu saling tolong satu sama lain agar tidak ada anggota komunitas mereka yang kelaparan di saat ada anggota komunitas yang lain kenyang. Jikapun ada kesalahpahaman dan konflik antar warga, mereka segera bisa menemukan jalan tengah dengan bantuan atau mediasi dari anggota masyarakat lainnya sehingga konflik yang lebih besar dapat dihindari. Tanpa dukungan modal sosial tersebut, para penyintas gempa di KLU sangat mungkin terlibat konflik satu sama lain untuk memperebutkan kebutuhan hidup sebagaimana terjadi pada saat bencana gempa melanda Kota Padang pada 2009 sebagaimana dijelaskan oleh Firdaus (2014) dan Ariesta (2014) yang melakukan studi sosiologis terhadap konflik yang terjadi pasca gempa padang 2009. Lebih dari itu, modal sosial yang ditunjukkan oleh pengungsi penyintas gempa di KLU berperan sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup seluruh anggota komunitas selama masa tanggap darurat. Jika masyarakat tidak memiliki modal sosial sekuat ini, dapat dipastikan bahwa akan ada anggota masyarakat yang tidak mampu bertahan hidup karena tidak mampu menemukan sumber nafkah untuk keluarganya. Hal ini senada dengan kesimpulan Anwar (2013) yang menyatakan bahwa modal sosial menjadi sumber daya nyata yang dapat mengembangkan dan memperkuat pilihan-pilihan sumber nafkah masyarakat pesisir. Demikian juga Setiawan & Pratitis (2015) menyebut bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap daya resiliensi sosial masyarakat korban lumpur lapindo.

Dalam situasi tanggap darurat pasca bencana, para pengungsi penyintas gempa harus mampu melakukan adaptasi diri dengan cepat. Jika tidak, situasi sulit yang mereka hadapi bisa mendorong terjadinya depresi massal serta menciptakan bencana baru, yakni bencana sosial. Hasil observasi berperan serta yang kami lakukan menunjukkan bahwa kapasitas resiliensi masyarakat penyintas gempa di KLU dalam menghadapi situasi tanggap darurat sangat dipengaruhi oleh adanya sikap saling pengertian, gotong royong, dan perasaan senasib sepenanggungan. Hal ini terlihat dari beberapa hal seperti tidak adanya upaya masyarakat untuk menjarah toko-

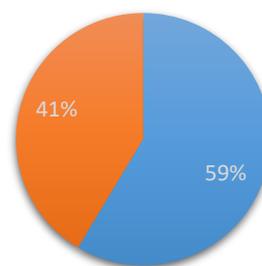
toko atau kios yang ada di sekitar mereka karena menganggap bahwa pemilik kios juga sedang mengalami kesulitan seperti mereka. Jikapun harus mengambil makanan yang tersedia di kios, selalu atas izin dari pemilik atau keluarga pemilik kios tersebut. Bahkan jika ada yang berusaha mencuri atau menjarah, ada lebih banyak anggota masyarakat yang mencegah dan melarang. Selain itu, modal sosial masyarakat juga terlihat dari munculnya dapur umum yang dikelola sendiri oleh para penyintas gempa dengan memanfaatkan alat-alat dapur yang tersisa dari reruntuhan rumah milik siapapun. Para pengungsi itu juga secara sukarela berbagi makanan, pakaian, dan kebutuhan lain kepada pengungsi lain yang terlihat lebih membutuhkan. Pada dasarnya, modal sosial seperti itu tidak muncul serta merta pada saat bencana, melainkan sudah menjadi kearifan lokal jauh sebelum bencana melanda. Adger *et al*(2005) menjelaskan bahwa kerentanan sosial masyarakat dalam menghadapi bencana dipengaruhi oleh tingkat resiliensi dan kearifan lokal masyarakat yang terbentuk sebelum maupun setelah bencana. Lebih jauh dari itu, masyarakat juga memiliki inisiatif sendiri untuk membentuk struktur kelembagaan sosial sebagai pengelola logistik kebutuhan para pengungsi. Dengan demikian, logistik tersebut tersebar secara adil dan merata kepada seluruh pengungsi. Hal ini merupakan bukti dari kapasitas resiliensi masyarakat penyintas gempa KLU yang sudah sampai pada implementasi dimensi ketiga dari rumusan dimensi resiliensi sosial menurut Keck dan Sakdapolrak (2013) yang dijelaskan sebelumnya. Dalam survey yang kami lakukan dengan metode DTM, dimana kami melakukan wawancara dengan perwakilan pengungsi di titik – titik pengungsian yang dihuni oleh minimal 4 KK atau minimal 16 jiwa, kami temukan data jumlah titik pengungsian yang memiliki pengurus atau pengelola sendiri sebagai berikut:

Wilayah Perkotaan



■ Ada Pengurus ■ Tanpa Pengurus

Wilayah Pedesaan



■ Ada Pengurus ■ Tanpa Pengurus

Diagram lingkaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar tempat pengungsian yang didata selama DTM membentuk struktur kelembagaan sosial untuk mengelola lokasi pengungsian tersebut. Hal ini mencerminkan kuatnya modal sosial masyarakat penyintas gempa di KLU. Meski demikian, diagram diatas juga menunjukkan bahwa persentase titik pengungsian yang memiliki struktur kelembagaan sosial di wilayah perkotaan lebih besar dari pada di wilayah pedesaan. Setelah kami telusuri melalui observasi dan wawancara mendalam, kami menemukan bahwa di wilayah pedesaan sebenarnya ada lebih banyak camp pengungsi yang memiliki struktur kelembagaan sosial, namun banyak diantaranya yang tidak ditunjuk secara resmi oleh para pengungsi melainkan muncul kepemimpinan yang bersifat informal dimana tokoh-tokoh desa menjalankan fungsi sebagai pengatur dan pengelola tempat pengungsian. Meski tidak resmi, namun model kepemimpinan ini di wilayah pedesaan ini tidak kalah efektif dibanding kepengurusan yang bersifat formal dan resmi. Model kepemimpinan seperti ini disebut dengan kepemimpinan karismatik yang bercirikan: (1) kuatnya integritas personal pemimpin; (2) kemampuan pemimpin dalam menginspirasi dan mengarahkan; (3) memiliki kemampuan untuk mengabdikan secara altruistik, yakni kuatnya kepercayaan sosial terhadap pemimpin; (4) pemimpin memiliki keistimewaan yang spesifik; (5) kemampuan komunikasi dan resolusi konflik sang pemimpin yang baik (Pranadji, 2003).

Penelitian ini membuktikan bahwa modal sosial masyarakat memiliki peran signifikan dalam menunjang kemampuan masyarakat pengungsi penyintas gempa dalam beradaptasi dan menyesuaikan diri pada masa tanggap darurat pasca gempa di KLU. Modal sosial ini terbentuk dari intraksi sosio kultural jangka panjang antar anggota masyarakat yang terdampak gempa (Adger, et al., 2005). Oleh sebab itu, memperkuat modal sosial adalah salah satu upaya paling penting dalam memperkuat mitigasi kebencanaan masyarakat sehingga kerugian materil maupun jiwa akibat bencana dapat diminimalisir. Penguatan modal sosial ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program-program pemberdayaan sosial yang berbasis partisipasi masyarakat. Modal sosial dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan timbal balik atau *interdependence* satu sama lain dimana partisipasi masyarakat akan menjadi tinggi jika modal sosialnya tinggi dan modal sosial akan meningkat jika masyarakat sering terlibat atau berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas sosial di komunitasnya (Liu & Besser, 2009).

KESIMPULAN DAN SARAN

Bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok pada tahun 2018 telah menyebabkan kerugian fisik dan materil yang cukup besar bagi masyarakat KLU. Salah satu kerugian yang paling mengganggu kehidupan masyarakat adalah hilangnya sumber nafkah rumah tangga (*livelihood system*) masyarakat yang terjadi pada seluruh sektor pekerjaan, termasuk di sektor pertanian. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan bencana lanjutan berupa bencana sosial seperti konflik, kerusuhan, penjarahan, dan tindakan kriminal lainnya sebagai cara masyarakat untuk memenuhi nafkah keluarganya pada masa tanggap darurat bencana. Namun bencana lanjutan tersebut tidak terjadi di KLU pasca gempa karena para pengungsi penyintas gempa memiliki kemampuan resiliensi sosial yang sangat bagus yang ditopang oleh kuatnya modal sosial masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama, terutama pada masyarakat pertanian yang terbiasa bekerja dengan norma-norma komunal. Alih-alih menyebabkan konflik dan masalah sosial lainnya, bencana gempa tersebut justru memperkuat ikatan solidaritas dan modal sosial masyarakat KLU. Dengan modal sosial yang kuat tersebut, para pengungsi mengelola nafkah harian rumah tangganya dengan mengandalkan bantuan pihak luar, sumber daya alam sekitar, dan aset pribadi yang tersisa yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat dengan membentuk struktur pengelolaan *camp* pengungsian. Dengan kata lain, pemanfaatan dan eksploitasi diri (*self exploitation*) terhadap modal sosial yang dimiliki masyarakat dijadikan sebagai strategi utama dalam pemenuhan nafkah rumah tangga para pengungsi yang memungkinkan mereka untuk memiliki daya resiliensi yang tinggi sehingga mereka mampu untuk bertahan hidup dan beradaptasi dalam menghadapi masa krisis pada periode tanggap darurat bencana yang penuh tekanan.

ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kepada International Organization for Migration (IOM) yang telah membiayai pelaksanaan program Displacement Tracking Matrix (DTM) di seluruh wilayah terdampak gempa ombok 2018 yang menjadi salah satu sumber data utama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. et al., 2005. Social-Ecological Resilience to Coastal Disaster. *SCIENCE*, 12 Agustus, 309(5737), pp. 1036-1040.
- Alviawati, E., 2013. Strategi Penghidupan Rumah Tangga Peternak Sapi Perah di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Pra dan Pasca Erupsi Merapi 2010. *Majalah Geografi Indonesia*, September, 27(2), pp. 104-117.
- Anwar, S. J., 2013. Strategi Nafkah (Livelihood) Masyarakat Pesisir Berbasis Modal Sosial. *SOCIUS*, XIII(01), pp. 1-21.
- Ariesta, I., 2014. Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, I(2), pp. 41-52.
- Dharmawan, A. H., 2007. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality*, Agustus, 01(02), pp. 169-192.
- Fatmasari, R., Salman, D., Darma, R. & Musa, Y., 2019. *Household Adaptation Address Strategy in Dealing With the Ecological Establishment in the Expansion of Palm Plantation in Mamuju Central District, Indonesia*. s.l., IOP Publishing.
- Firdaus, 2014. Protes Korban Bencana: Studi Konflik Penanganan Bencana di Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, I(2), pp. 27-40.
- Liu, A. Q. & Besser, T., 2009. Social Capital and Participation in Community Improvement Activities by Elderly Residents in Small Towns and Rural Communities. *Rural Sociology Society*, 68(03), pp. 343-365.
- Mathes, E. W., 1981. Maslow's Hierarchy of Needs As a Guide for Living. *Journal of Humanistic Psychology*, 21(4), pp. 69-81.
- Pranadji, T., 2003. Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(1), pp. 12-25.
- Setiawan, A. & Pratitis, N. T., 2015. Religiusitas, Dukungan Sosial, dan Resiliensi Korban Lumpur Lapindo. *Pesona: Jurnal Psikologi Indonesia*, IV(02), pp. 137-144.